

**HUBUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN  
MONETER DENGAN INFLASI DI INDONESIA  
PERIODE 2005Q1 S/D 2015Q4**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Bagus Kurniawan  
135020401111049**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	1
DAFTAR ISI.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN .....	3
ABSTRAK .....	4
A. PENDAHULUAN.....	4
B. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
C. KERANGKA TEORITIS .....	8
D. METODOLOGI PENELITIAN .....	9
E. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
F. PENUTUP.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	15

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**HUBUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN  
MONETER DENGAN INFLASI DI INDONESIA PERIODE  
2005Q1 S/D 2015Q4**

Yang disusun oleh :

Nama : Bagus Kurniawan  
NIM : 135020401111049  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : SI Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Mei 2017

Malang, 18 Mei 2017

Dosen Pembimbing,



Shofwan, SE., M.SI

NIP. 197305172003121002

# Hubungan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dengan Inflasi di Indonesia Periode 2005Q1 s/d 2015Q4

Bagus Kurniawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: bkkurniawan04@gmail.com

## ABSTRAK

*Inflasi merupakan indikator stabilitas perekonomian, inflasi akan menjadi permasalahan dalam perekonomian jika tidak dikontrol, kebijakan yang digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi adalah Kebijakan Fiskal dan Moneter.*

*Penelitian ini menggunakan data pengeluaran pemerintah sebagai proxy dari Kebijakan Fiskal dan tingkat suku bunga dan JUB sebagai proxy dari Kebijakan Moneter. rentan waktu yang digunakan adalah 2005 s/d 2015. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM). Peneliti ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Moneter dengan Inflasi di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.*

*Hasil empiris mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel inflasi periode sebelumnya dan JUB memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia dengan arah positif. sementara dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga dan JUB memiliki hubungan dengan inflasi di Indonesia.*

*Pegeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan arah negative sementara tingkat suku bunga dan JUB memiliki hubungan dengan arah yang positif.*

*Kata kunci: Kebijakan Fiskal, Moneter, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat suku bunga, Tingkat Inflasi, JUB, VECM*

---

## A. PENDAHULUAN

Setiap perekonomian yang ada di negara selalu mengalami suatu permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang selalu ada di dalam perekonomian suatu negara adalah masalah tingkat inflasi. Dimana tingkat inflasi selalu muncul baik ketika perekonomian suatu negara sedang mengalami pertumbuhan ataupun ketika perekonomian suatu negara sedang mengalami perlambatan. Begitu juga perekonomian di Indonesia, selalu terdapat permasalahan ekonomi yang selalu muncul seiring dengan berjalannya waktu, termasuk juga masalah tingkat inflasi.

Di Indonesia sendiri memiliki sejarah tingkat inflasi yang berbeda-beda dalam rentang waktu tertentu. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis hingga menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia mencapai 77,5%, selain itu pada tahun 2005 Indonesia mengalami inflasi sedang dengan tingkat inflasi sebesar 17,11%, selanjutnya pada tahun 2008 tingkat inflasi di Indonesia sebesar 11,06%. Tingkat inflasi yang cukup tinggi ini tentu menjadi dilema bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketika tingkat inflasi yang tidak terkendali maka akan menimbulkan masalah lain dalam perekonomian

Tingkat inflasi sendiri merupakan indikator stabilitas perekonomian, inflasi dianggap sebagai permasalahan ekonomi yang sangat penting, hal inilah yang menyebabkan inflasi menjadi target utama yang harus dikendalikan oleh pemerintah. Inflasi sendiri merupakan suatu fenomena kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus (Boediono, 2014), tingkat inflasi yang stabil maka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai, sebaliknya jika tingkat inflasi tidak bisa terkendali maka inflasi akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, seperti ketidakstabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat pengangguran meningkat.

Hal ini juga sama dengan menurut Langiet al (2014), dimana ketika tingkat inflasi tidak stabil maka akan terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi dalam jangka waktu atau periode tertentu. Ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan maka akan menyebabkan turunya daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa yang dinilai terlalu

tinggi, akibatnya barang dan jasa hasil produksi tidak habis terjual dan menyebabkan kerugian bagi produsen dan produsen tidak akan melakukan investasi tambahan. Sehingga tingkat investasi akan berkurang dan akan menyebabkan turunnya tingkat pendapatan nasional.

Sehingga diperlukan peran pemerintah dalam perekonomian ditujukan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam perekonomian suatu negara. Misalkan inflasi yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang terus meningkat dan juga defisit neraca pembayaran. Tingkat inflasi yang tidak terkontrol tentu akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tingkat inflasi yang ada. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, pemerintah Indonesia menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dimana pemerintah sebagai otoritas yang memegang kebijakan fiskal, sementara kebijakan moneter di pegang oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Dalam perspektif teoritis, kebijakan fiskal adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian, tindakan yang digunakan dalam mempengaruhi perekonomian adalah dengan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian. Kedua instrumen kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran sangat penting, karena kedua instrumen tersebut berkaitan erat dengan anggaran negara, (Prasetyia, 2011). Dengan pengaturan anggaran negara, diharapkan kebijakan fiskal dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan terus tumbuh.

Kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam perekonomian, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah memiliki multiplier effect bagi perekonomian, pendapat ini dikemukakan oleh Keynes. (Surjaningsih et al, 2012). Sementara menurut Mankiw (2007), perekonomian dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran dengan tujuan pembangunan. Menurut Surasmono (2013), hal ini sudah terbukti dengan adanya peran pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi di negara maju, ketika sedang mengalami krisis diharapkan pemerintah memberikan stimulus fiskal yang dapat merangsang permintaan agregat melalui belanja negara dan investasi.

Dalam menekan laju inflasi di Indonesia selain melalui kebijakan fiskal, juga melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam hal menjaga kestabilan nilai uang dan juga mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga peredaran uang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kebijakan moneter memiliki target kebijakan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan tingkat inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran, (Pohan, 2008). Inflasi adalah salah satu indikator perekonomian yang perlu diperhatikan. Dimana laju pertumbuhan inflasi sangat diupayakan agar selalu rendah dan stabil, hal ini dikarenakan ketidakstabilan inflasi akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan ekonomi (Langi et al, 2014). Krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia terjadi karena tidakstabilnya tingkat inflasi sehingga perekonomian tidak stabil. Bank Indonesia selaku otoritas moneter, menggunakan tingkat suku bunga dan pengaturan jumlah uang beredar (JUB) sebagai salah satu instrumen untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil.

Selain tingkat suku bunga, instrumen kebijakan moneter yang digunakan adalah pengaturan jumlah uang beredar (JUB). Dengan menetapkan jumlah uang beredar diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat inflasi di Indonesia. Dengan meningkatnya JUB diharapkan mampu mempengaruhi tingkat konsumsi di masyarakat. Tetapi disisi lain akan menyebabkan meningkatnya tingkat inflasi.

Dari fakta yang ada ternyata tingkat inflasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter dari tahun ketahun selalu tidak tepat sasaran. Sehingga menimbulkan pertanyaan sebenarnya hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter dengan inflasi di Indonesia memiliki hubungan yang bagaimana? Karena target inflasi yang telah ditetapkan selalu meleset.

**Table 1.1 Target Inflasi dan Inflasi Aktual**

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual
-------	----------------	----------------

2005	6 ±1%	17.11
2006	8 ±1%	6.6
2007	6 ±1%	6.59
2008	5 ±1%	11.06
2009	4,5 ±1%	2.78
2010	5±1%	6.96
2011	5±1%	3.79
2012	4.5±1%	4.3
2013	4.5±1%	8.83
2014	4.5±1%	8.36

Sumber : Data diolah Bank Indonesia, 2017

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Tingkat Inflasi

Ada beberapa teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang telah dikembangkan para ekonom.

- a. WW Rostow dan RA Musgrave berpendapat bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Ada perbedaan fokus alokasi sumber daya antara negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjut yang kemudian tercermin dalam pengeluaran negara. Masing-masing tentunya berawal dari kebutuhan yang berbeda, sehingga arah kebijakannya juga berbeda. Ini tentunya berkaitan dengan seberapa lama negara itu telah merdeka dan kualitas sumber daya manusianya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui negara pada awal perkembangan ekonomi sebelum menuju tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga, ada beberapa hal yang sudah terpenuhi oleh negara pada tahap lanjut pembangunan, sehingga tidak perlu lagi terfokus pada penyediaan prasarana layaknya negara pada tahap awal perkembangan.
- b. Teori kuantitas  
Teori ini menganggap bahwa inflasi hanya terjadi bila terjadi penambahan jumlah penawaran uang beredar. Inflasi tidak akan terjadi apabila jumlah penawaran uang tidak ditambah, pendapat selanjutnya adalah bahwa laju inflasi ditentukan oleh perilaku dan harapan masyarakat akan inflasi, jadi ketika jumlah uang beredar bertambah tetapi masyarakat belum membelanjakan uangnya sehingga tambahan uang hanya digunakan untuk mengisi kas masyarakat, tetapi ketika masyarakat sudah mulai menyadari adanya inflasi maka masyarakat akan membelanjakan uangnya karena takut akan terjadi inflasi yang lebih tinggi dan masyarakat kehilangan manfaat untuk memegang uang, maka masyarakat akan membelanjakan uang yang dipegang, sehingga permintaan akan barang akan meningkat dan inflasi juga akan meningkat, (Boediono, 2014).
- c. Teori Keynes  
Teori ini berpendapat bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup lebih dari batas kemampuan ekonominya, sehingga permintaan di masyarakat akan lebih besar dari barang-barang yang tersedia. Setiap individu dalam ekonomi akan berusaha mendapatkan dana lebih guna membiayai permintaan yang ada. Jadi individu yang dapat hidup melewati kemampuan ekonominya adalah individu yang memperoleh dana tambahan. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, maka pemerintah akan mencetak uang baru.
- d. Teori Strukturalis  
Teori ini berpendapat bahwa inflasi dikaitkan dengan struktural perekonomian suatu negara, teori ini menitik beratkan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara berkembang. Di dalam struktur perekonomian negara yang sedang berkembang terdapat 2 ketegaran utama

yaitu, ketidak elastisan dari penerimaan ekspor. Hal ini terjadi ketika pertumbuhan ekspor lebih lambat dari pertumbuhan sektor lain. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan negara untuk melakukan impor barang, sehingga akan menggunakan barang produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan masyarakat, dimana produk dalam negeri memiliki kualitas yang kalah dari barang impor sementara harga barang yang tinggi. Jika hal ini terjadi secara meluas maka akan terjadi inflasi. Ketegaran yang kedua adalah adanya ketidak elastisan dari produksi bahan makanan. Hal ini terjadi ketika pertumbuhan produksi bahan makanan lebih lambat dari pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita di negara yang sedang berkembang. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga bahan makanan di negara yang sedang berkembang, sementara para pekerja akan menuntut kenaikan gaji untuk mengimbangi kenaikan harga bahan makanan. Kenaikan gaji pekerja akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga meningkatkan harga jual barang. Hal ini akan terjadi secara berulang –ulang, (Boediono, 2014).

### **b. Hubungan Tingkat Jumlah Uang Beredar dengan Tingkat Inflasi**

Beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara JUB dengan tingkat inflasi, salah satunya adalah teori kuantitas uang klasik yang diperkenalkan oleh Irving Fisher. Irving Fisher dalam Boediono (2014) berpendapat bahwa Permintaan uang di dalam suatu masyarakat merupakan proporsi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi merupakan suatu proporsi konstan dari pendapatan nasional. Jadi permintaan akan uang akan dipengaruhi oleh pendapatan nasional saja, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat bunga. Selain itu tingkat pendapatan nasional yang equilibrium tidak bisa dipengaruhi kebijakan fiskal.

Menurut Mishkin (2008), jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif terhadap inflasi. dimana ketika terjadi penambahan pada jumlah uang yang beredar maka akan mendorong kenaikan tingkat harga melebihi tingkat harga yang diharapkan, sehingga akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi. Sementara menurut Dornbusch dan Fischer (1997) dalam Langi et al (2014), laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi secara berkelanjutan akan menghasilkan laju inflasi yang tinggi dan laju pertumbuhan uang beredar yang rendah pada gilirannya akan mengakibatkan laju inflasi rendah. Selanjutnya pernyataan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter mengandung arti bahwa laju inflasi yang tinggi tidak akan berlangsung terus apabila tidak disertai dengan laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi.

### **c. Hubungan Tingkat Suku Bunga dengan Tingkat Inflasi**

Indonesia sudah menetapkan kebijakan pengendalian suku bunga sebagai indikator kebijakan moneter sejak tahun 2005 bersamaan dengan inflasi sebagai sasaran tunggal kebijakan moneter. Hal ini dilakukan karena semakin berkembangnya penggunaan uang yang bukan hanya untuk alat transaksi saja. Pengendalian suku bunga ini diharapkan dapat mempengaruhi stabilitas harga atau inflasi, (Pohan 2008). Menurut Carl dan Fair (2007), suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman yang telah dilakukan. Sementara menurut Sunariyah (2006), adalah harga dari pinjaman, dimana bunga adalah suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

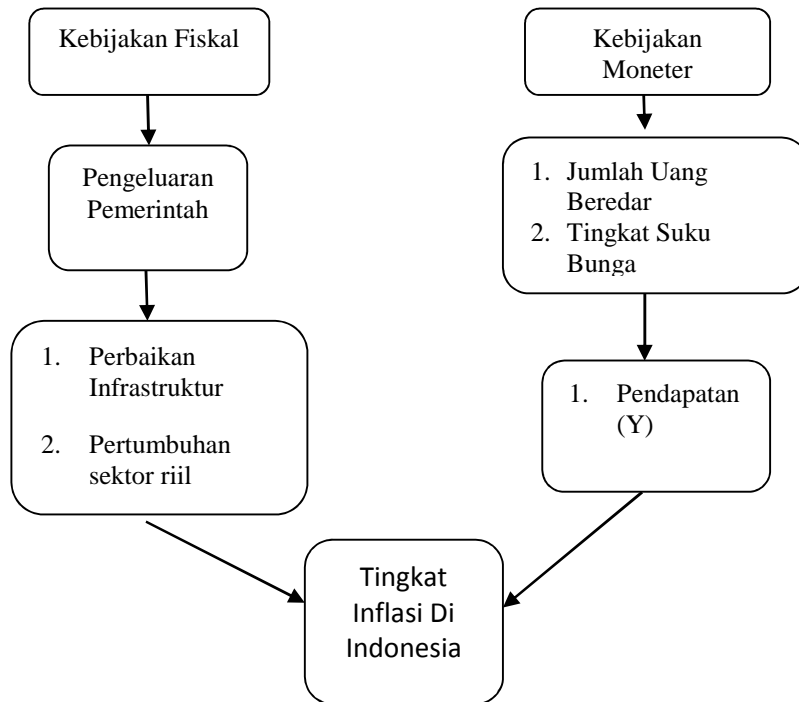
Dimana hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi memiliki hubungan yang negatif dimana ketika inflasi meningkat maka otoritas moneter akan melakukan kebijakan dengan meningkatkan tingkat suku bunga dengan tujuan agar tingkat inflasi kembali stabil. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya tingkat suku bunga maka akan diikuti dengan peningkatan tingkat suku bunga kredit dan deposito, sehingga masyarakat akan cenderung untuk mengurangi memegang uang dan memilih menempatkan uangnya ke lembaga keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan teori Cambridge dimana Teori ini berpendapat bahwa, perilaku masyarakat memegang kekayaan dalam bentuk uang karena uang bersifat liquid sehingga mudah ditukarkan ke dalam bentuk kekayaan lain. Tetapi disisi lain, jika memegang kekayaan dalam bentuk uang akan mengorbankan peluang untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk pendapatan bunga jika memegang kekayaan dalam bentuk surat berharga. Teori ini menekankan pada perilaku masyarakat akan untung-rugi dalam memegang uang. Dari teori inilah diketahui bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan dengan

tingkat inflasi, ketika inflasi dirasa terlalu tinggi maka tingkat suku bunga dinaikkan, sehingga memberikan pertimbangan bagi pemegang uang untuk menempatkan dananya di bank karena memiliki pengembalian yang tinggi. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dimiliki menyebabkan masyarakat menempatkan dananya di bank, dengan tingkat peredaran uang di masyarakat akan dapat dikurangi dan akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi yang terjadi, (Boediono, 2014).

### C. KERANGKA TEORITIS

Berdasarkan ladsan teori yang ada, penelitian ini memiliki kerangka pikir bahwa ketika ada pemerintah menambahkan jumlah pengeluaran pemerintah maka akan mempengaruhi pertumbuhan pada sektor riil, dengan tumbuhnya sektor riil maka akan menekan tingkat inflasi karena adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sementara dari sisi moneter tingkat suku bunga dan JUB digunakan untuk mengatur kestabilan ekonomi dan tingkat inflasi dengan mengatur peredaran uang.

**Gambar 1 : Kerangka Pikir**



Sumber : Penulis, 2017

### D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari data publikasi dari Bank Indonesia, BPS, dan juga Kementerian Perdagangan. Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan dokumentasi yang mengharuskan peneliti untuk mencari dan mempelajari data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun retan waktu data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rentan waktu 2005 s/d 2015.



### Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Vector Error Correction Model* (VECM) yang sering digunakan dalam penelitian yang ingin mengetahui hubungan antar variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam penelitian ini VECM digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga dan JUB dengan tingkat inflasi di Indonesia. Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut ini :

$$INF_t = \alpha_0 + \alpha_1 INF_{t-1} + \alpha_2 \Delta INF_{t-1} + \alpha_3 \Delta GOV_{t-1} + \alpha_4 \Delta R_{t-1} + \alpha_5 \Delta JUB_{t-1} + \epsilon_t$$

Keterangan :

- $\Delta INF_t$  = Perubahan Inflasi periode tertentu
- $\alpha_0$  = konstanta
- $\Delta$  = *error Correction term*(ECT)
- $INF_{t-i}$  = inflasi periode tertentu
- $GOV_{t-i}$  = pengeluaran pemerintah periode tertentu
- $R_{t-i}$  = suku bunga periode tertentu
- $JUB_{t-i}$  = JUB periode tertentu

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Analisis

Dalam pengujian menggunakan model VECM, harus melalui beberapa pengujian antara lain adalah pengujian stasioneritas data penelitian. Hasil uji stasioneritas data adalah sebagai berikut

**Tabel 2 : Uji Stasioneritas**

Variabel Penelitian	Signifikan 1 <sup>st</sup> Different	
	t statistik	Prob
Inflasi (inf)	-0.684405	(0.0000)
Tingkat Suku Bunga (r)	-6.181620	(0.0000)
Pengeluaran Pemerintah (Gov)	-4781172	(0.0003)
Jumlah Uang Beredar (JUB)	-9242092	(0.0000)

Sumber : data diolah *Eviews*, 2017

Dari tabel 2 diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian ini

telah stasioner pada tingkat *1st Different*. Menurut Gujarati (2004), stasioneritas suatu data dalam penelitian sangat penting, terutama dalam penggunaan data dalam bentuk time series, karena stasioneritas suatu data akan mempengaruhi hasil estimasi regresi. Dimana regresi data yang tidak stasioner akan menyebabkan hasil regresi palsu, dimana memiliki R<sup>2</sup> yang tinggi dan signifikansi t statistic yang tinggi juga tetapi tidak sesuai atau tidak berarti secara teori. Setelah semua data telah distasionerkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian penentuan lag optimum. Hasil uji lag optimum yang telah dilakukan dapat dilihat dibawah ini,

**Table 3 : Lag Optimum**

lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA	5.1211	-12.34357	-12.17974	-12.28316
1	354.8143*	9.5315*	-20.93661*	-20.11744*	-20.63453*

Sumber : data *Eviews* diolah, 2017

Menurut Gujarati (2003), penentuan lag optimal dapat dilakukan dengan menggunakan criteria informasi Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz Information Criterion (SIC), atau dengan Hannan-Quin Information Criterion (HQ). Dari hasil uji Lag Optimum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Lag Optimal pada variabel ini adalah pada Lag 1, hal ini dapat dilihat dari table 3 dimana pada Lag 1 terdapat tanda (\*) yang menunjukkan bahwa lag 1 adalah Lag Optimum. Setelah dilakukan uji Lag Optimum, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian kointegrasi, hasil uji kointegrasi adalah sebagai berikut ini,

**Table 4 : Uji Kointegrasi**

Trace stat	Critical value	Prob	Eigen stat	Critical value	Prob	kointegrasi
63.89655	47.85613	0.0008	39.61773	27.58434	0.0009	1
24.27882	29.79707	0.1889	14.60923	21.13162	0.3172	0
9.669595	15.49471	0.3070	7.294174	14.26460	0.4549	0
2.375421	3.841466	0.1233	2.375421	3.841466	0.1233	0

Sumber : Data *Eviews* diolah, 2017

Uji kointegrasi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak ada keseimbangan jangka panjang antar variabel dalam model. Jadi jika pengujian menghasilkan kointegrasi antar variabel maka ada hubungan dalam jangka panjang dalam model tersebut. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa dalam pengujian kointegrasi terdapat kointegrasi antar variabel, hal ini dapat dilihat dari nilai Trace Stat dan juga Eigen Stat yang memiliki satu persamaan yang signifikan. Dengan adanya kointegrasi dalam variabel penelitian maka akan dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian VECM. Namun sebelum Uji VECM, dilakukan Uji Granger Kausalitas dengan tujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel.

**Table 5 : Uji Granger Kausalitas**

GOV does not granger cause INF	0.6864
INF does not granger cause GOV	0.0005
JUB does not granger cause INF	0.0214
INF does not granger cause JUB	0.9675
R does not granger cause INF	0.0017

INF does not granger cause R	0.0004
------------------------------	--------

Sumber : Data *Eviews* diolah, 2017

Menurut Granger (1969) dan Gujarati (2003), uji kausalitas Granger melihat pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang sehingga uji ini memang tepat dipergunakan untuk data time series. Dari table 5, diketahui bahwa hasil pengujian kausalitas terdapat hubungan dua arah antara variabel tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi, sementara untuk variabel pengeluaran pemerintah dan JUB dengan inflasi hanya memiliki hubungan satu arah. Dimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat inflasi dan inflasi mempengaruhi JUB.

Tahap selanjutnya adalah uji VECM, uji VECM dilakukan dikarenakan terdapat kointegrasi antara variabel yang menandakan adanya hubungan dalam angka pajang yang terjadi antar variabel penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hasil dari pengujian VECM adalah sebagai berikut ini

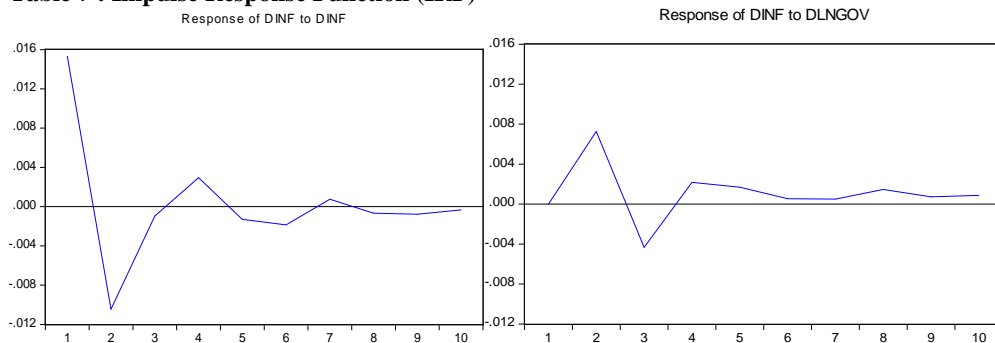
**Table 6 : Vector Error Corection Model (VECM)**

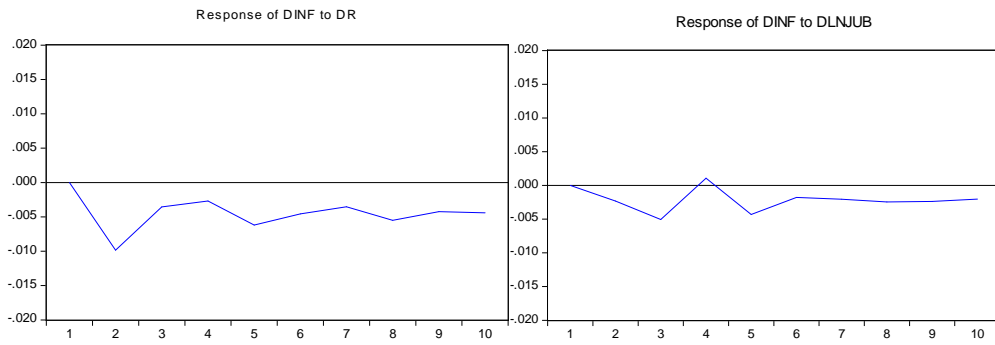
Variabel	Jangka Pendek	Jangka Panjang	ECT	t-table
INF	0.494288 (2.98716)		-2.385179 (-9.32904)	2.021
GOV	-0.000934 (-0.01219)	-0.115598 (-3.69517)		
R	0.179194 (0.91836)	0.346965 (3.44687)		
JUB	0.317306 (3.69781)	0.188346 (2.17767)		

Sumber : Data *Eviews* dioalah, 2017

VECM adalah salah satu bentuk dari VAR yang terektriksi karena adanya hubungan jangka panjang antar variabel agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasi namun tetap membiarkan perubahan dinamis dalam jangka pendek.

**Table 7 : Impulse Response Function (IRF)**

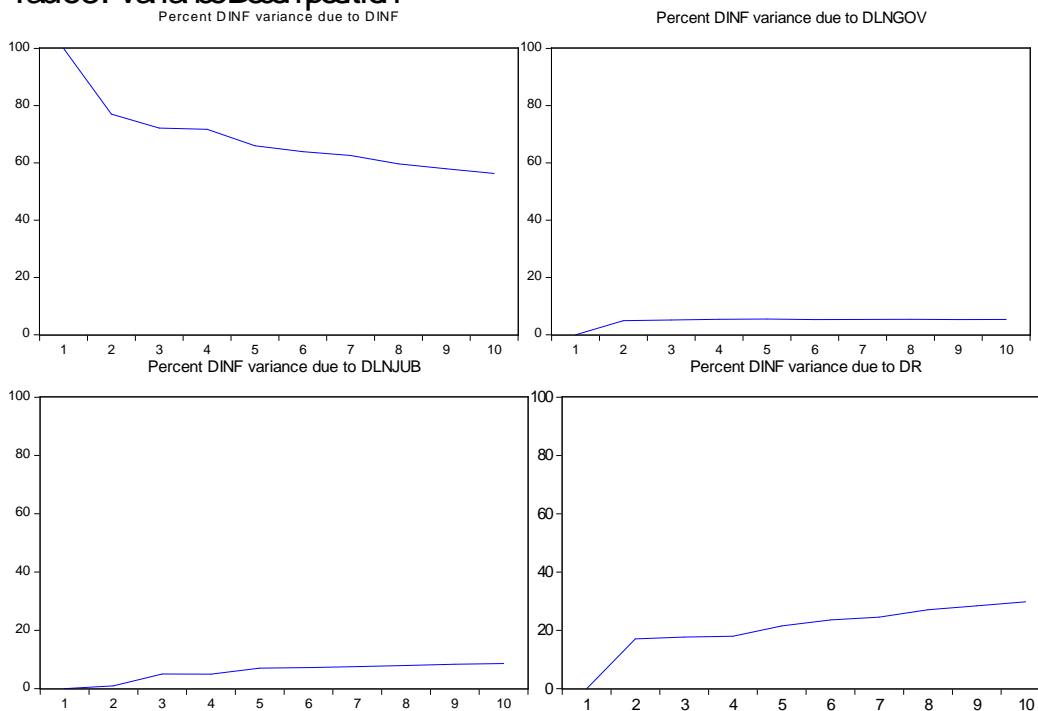




Sumber : Data Eviews diolah, 2017

IRF Merupakan salah satu metode pada VAR/VECM yang digunakan untuk melihat respon variabel endogen terhadap pengaruh inovasi variabel endogen lain yang ada dalam model. Analisis IRF mampu melacak respon dari variabel endogen dalam model VAR akibat adanya suatu shock atau perubahan di dalam variabel gangguan ( $\epsilon$ ), yang selanjutnya dapat melihat lamanya pengaruh dari shock suatu variabel terhadap variabel lain hingga pengaruhnya hilang dan kembali konvergen.

Table8: Variance Decomposition



Sumber : Data Eviews diolah, 2017

Analisis Variance Decomposition (VD) atau dikenal sebagai forecast error variance decomposition merupakan alat analisis pada model VAR/VECM yang akan memberikan informasi mengenai proporsi dari pergerakan pengaruh shock pada satu variabel terhadap variabel lainnya pada saat ini dan periode ke depannya. VD menggambarkan relatif pentingnya setiap variabel dalam model VAR karena adanya shock atau seberapa kuat komposisi dari peranan variabel tertentu terhadap variabel lainnya.

Dari pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa dalam jangka pendek tingkat inflasi di Indonesia hanya memiliki hubungan dengan tingkat inflasi pada periode sebelumnya ( $t-1$ ), dimana

hubungan tersebut signifikan dan menyebabkan inflasi meningkat karena hubungan tersebut memiliki arah yang positif dengan tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori kuantitas dimana salah satu faktor yang menyebabkan inflasi adalah tingkat ekspektasi masyarakat akan inflasi pada periode yang akan datang, dalam penelitian ini ekspektasi masyarakat akan inflasi menyebabkan tingkat inflasi meningkat karena hubungannya positif (Boediono, 2014). Sementara untuk Error Correction Term (ECT) sebesar 2.385179, ECT berfungsi sebagai penyesuaian dalam jangka pendek karena ada guncangan.

Sementara pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek memiliki koefisien negatif tetapi memiliki hubungan yang tidak signifikan. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan alokasi pada pengeluaran pemerintah, dimana adanya peningkatan alokasi pada pembayaran hutang yang terus meningkat (Hamzah dan Sofilda, 2006). Sementara untuk jangka panjang pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat inflasi dan cenderung menyebabkan tingkat inflasi menurun, (Sutawijaya dan Lestari, 2013). Hal ini dikarenakan adanya alokasi pengeluaran pemerintah ke sektor infrastruktur yang menyebabkan meningkatnya kualitas infrastruktur di Indonesia. Dengan meningkatnya infrastruktur tersebut maka distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, (Surjaningsih *et al*, 2012). Selain itu pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor riil melalui alokasi dengan tujuan pengembangan sektor riil, sehingga dalam jangka panjang dapat menciptakan keseimbangan dalam permintaan dan penawaran.

Selanjutnya tingkat suku bunga dalam jangka pendek memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan tingkat inflasi dan memiliki arah positif dalam jangka pendek. Hal ini dikarenakan adanya transmisi dalam kebijakan moneter, (Afandi, 2015). Sehingga ketika inflasi meningkat maka akan direspon Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga, tetapi peningkatan suku bunga tersebut tidak langsung direspon oleh bank umum. Sehingga peningkatan inflasi akan menyebabkan meningkatnya tingkat suku bunga dalam jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang tingkat suku bunga memiliki hubungan signifikan dengan tingkat inflasi dan memiliki arah yang positif. Hal ini dikarenakan peningkatan suku bunga banyak direspon oleh pelaku usaha, sehingga menyebabkan meningkatnya biaya investasi yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya harga jual dan pada akhirnya menyebabkan meningkatnya inflasi (*cosh push inflation*), (Indrawati, 1996) dan Pradipta (2011).

Sementara variabel JUB baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat inflasi di Indonesia. baik dalam jangka panjang dan jangka pendek memiliki hubungan positif dengan tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori dalam Mishkin (2008), JUB memiliki hubungan positif terhadap tingkat inflasi, hal ini dikarenakan ketika ada penambahan uang di masyarakat maka akan menyebabkan kecenderungan peningkatan konsumsi yang dilakukan masyarakat karena masyarakat memegang uang dalam jumlah yang lebih dari yang sebelumnya. Selain itu juga menurut Mankiw (2007), penambahan peredaran uang dalam jumlah yang berlebihan akan menyebabkan akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga melebihi tingkat yang diharapkan yang pada akhirnya akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi, dan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa negara dengan tingkat inflasi yang tinggi adalah negara dengan laju pertumbuhan uang yang tinggi juga. Selanjutnya menurut Langi *et al* (2014), juga mengatakan bahwa tingkat peredaran uang di masyarakat memiliki hubungan positif dengan tingkat inflasi di Indonesia.

## F. PENUTUP

### Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut ini,

- a. Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang signifikan dalam jangka panjang dan cenderung menyebabkan inflasi menurun, sementara untuk jangka pendek hubungannya tidak signifikan dengan tingkat inflasi.
- b. Tingkat suku bunga memiliki hubungan dengan tingkat inflasi dalam jangka panjang dan cenderung menyebabkan meningkatkan tingkat inflasi, sementara untuk jangka pendek memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan tingkat inflasi.

- c. Sementara JUB memiliki hubungan dengan tingkat inflasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dan memiliki kecenderungan meningkatkan inflasi karena hubungannya positif.

### **Saran**

Setelah melihat hasil dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang diberikan, antara lain sebagai berikut ini :

- a. Dalam penetapan pengeluaran pemerintah harus benar-benar diperhatikan karena perlu adanya penetapan alokasi yang benar sehingga pengeluaran pemerintah efektif dalam mengatasi inflasi.
- b. Perlu pertimbangan dalam menetapkan tingkat suku bunga dan JUB karena jika terjadi kesalahan maka akan menyebabkan peningkatan pada inflasi.
- c. Perlu adanya koordinasi yang intens antara otoritas fiskal dan juga moneter dalam menetapkan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dalam mengatasi masalah inflasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad Anif. 2015. Determinasi Inflasi dari Sisi Supply (Cost-Push Inflation) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 16, No 2.
- Bank Indonesia. Data Tingkat Inflasi di Indonesia. (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>). Diakses 20 Februari 2017.
- Boediono. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPFE.
- Case, Karl dan Fair, Ray. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi 8. Erlangga. Jakarta.
- Granger, C. W. J. 1969. Investigating Causal Relations by Econometric models and Cross-Spectral Methods. *Econometrica*, Vol 37, No. 3
- Gujarati, Domar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga. Jakarta
- Gujarati, Damodar. 2004. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. The McGraw-Hill Companies.
- Hamzah, Muhammad Zilal dan Eleonora Sofilda. 2006. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia : Pendekatan Error Correction Model (ECM). *Jurnal Kebijakan EKonomi*. Vol 2, No 1.
- Indrawati, Sri Mulyani. 1996. *Teori Moneter*. Jakarta : Lembaga Penerbitan UI.
- Langi, Theodores Manuel, Vecky Masinambow, Hanly Siwu. 2014. Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. Universitas Sam Ratulangi.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miskhin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Pradipta, Ramadhan Krishna. 2011. Analisis Pengaruh BI Rate, Jumlah Uang Beredar, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2005-2010. Skripsi Universitas Brawijaya.
- Prasetyia, Ferry. 2011. Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi. Vol 5. Universitas Brawijaya.
- Sunariyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta : STIM-YKPN.
- Surasmono, Hesti Wahyudi. 2013. Mekanisme Transmisi Kebijakan Fiskal : Analisis data Makroekonomi Di Indonesia Dengan Pendekatan Structural Vector Auto Regresson. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Katholik Indonesia.
- Surjaningsih et al. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Sutawijaya, Andrian, Ety Puji Lestari. 2013. Penerapan Metode Vector Auto Regression dalam Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia. Universitas Terbuka.